

APBD ALAMI PENINGKATAN



www.jatimpos.id

Bupati Musi Banyuasin, Dr. H .Dodi Reza Alex Noerdin menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muba tahun anggaran 2019, Senin (24/2). “Saya ucapkan terima kasih atas kinerja sama seluruh anggota DPRD Muba dalam program penganggaran, pembahasan, dan pengesahan APBD 2020 sehingga Muba menjadi salah satu kabupaten tercepat dalam pengesahan APBD 2020,” katanya.

Dalam laporannya, Dodi menerangkan visi pembangunan Muba 2005-2025 tertuang dalam Perda No 9 tahun 2008 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Muba yaitu Muba Maju, Mandiri dan Sejahtera 2025. Adapun visi jangka menengah 2017-2022, menuju Muba Maju Berjaya 2022. “Langkah nyata yang diwujudkan diantaranya peningkatan kualitas SDM, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah, peningkatan kualitas lingkungan, dan peningkatan keamanan dan pematapan reformasi birokrasi,” terangnya.

Secara makro APBD Muba 2019 mengalami peningkatan. APBD 2019 sebesar Rp4.188.639.749.990,72, di bandingkan 2018 sebesar Rp3.504.978.607.000,00.

Sedangkan, khusus pendapatan daerah 2019 sebesar Rp3.941.906.469.940,88. Rinciannya PAD Rp286.591.522.515,54, Dana Perimbangan Rp3.103.333.197.302, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp551.981.750.123,34. “Untuk belanja daerah 2019 terealisasi Rp3.647.212.439.376,96 atau 90,88% dari target yang telah dianggarkan sebesar Rp4.013.080.200.049,72 yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung,” terangnya.

Sugondo, Ketua DPRD mengatakan Pembahasan Laporan LKPJ Bupati 2019 ini merupakan yang tercepat dan nantinya lebih bersinergi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Muba. “LKPJ harus disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD dan menjadi hal yang wajib bagi Bupati Muba untuk menyampaikan hasil kejanya selama setahun terakhir,” katanya.

Rapat paripurna di pimpin Sugondo dan dihadiri anggota DPRD, perwakilan Dandim 0401 Muba, Kapolres, Kajari, Ketua PN, Ketua PA, Sekretaris Daerah Drs. Apriyadi, M.Si., para staf ahli bupati, para asisten Setda Muba, dan seluruh perangkat daerah Kabupaten Muba.

Sumber Berita:

Sumatera Ekspres, *APBD Alami Peningkatan*, Selasa, 25 Februari 2020, Hal.19.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

1. Pasal 1 angka 2 “Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran”;
2. Pasal 15 “Ruang lingkup LKPJ meliputi:
 - a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
3. Pasal 19 ayat 1 “Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”.